

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas *Magna Carta of Women* (MCW) dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina serta menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan perspektif *capabilities approach* Martha Nussbaum, penelitian ini menemukan bahwa kemampuan fundamental perempuan untuk hidup aman, memperoleh perlindungan, mengakses keadilan, dan terbebas dari kekerasan seksual belum sepenuhnya terwujud. Meskipun negara telah menyediakan instrumen hukum dan kelembagaan untuk melindungi perempuan, masih terdapat berbagai hambatan yang membatasi perempuan dalam menikmati kebebasan substantif dan keamanan atas tubuhnya (*bodily integrity*). Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hak secara formal tidak selalu diikuti oleh kemampuan nyata untuk mengakses dan menikmati hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis terhadap implementasi MCW menunjukkan adanya perbedaan antara capaian formal kebijakan dan dampak substantif yang dihasilkan. Sejak disahkan pada tahun 2009, MCW telah mendorong pembentukan berbagai mekanisme

perlindungan perempuan, termasuk penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang berfokus pada kesetaraan gender serta penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun, berbagai indikator yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang signifikan, tingkat pelaporan masih rendah, dan berbagai hambatan dalam akses terhadap perlindungan maupun keadilan masih ditemukan.

Penelitian ini menemukan bahwa budaya patriarki dan *machismo* merupakan faktor utama yang melemahkan efektivitas MCW. Nilai-nilai tersebut memengaruhi cara masyarakat memandang perempuan, membentuk cara institusi dan aparat merespons kasus kekerasan seksual. Budaya *victim blaming*, bias patriarkal dalam penegakan hukum, ketergantungan ekonomi perempuan, dominasi institusi informal, serta normalisasi *machismo* dalam ruang politik menunjukkan bahwa nilai patriarkal masih bekerja pada berbagai tingkat kehidupan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan yang telah dijamin secara hukum tidak selalu dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Melalui perspektif kekerasan simbolik Pierre Bourdieu, penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi patriarkal terus direproduksi melalui norma, nilai, dan praktik sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat. Akibatnya, berbagai bentuk subordinasi terhadap perempuan sering kali tidak dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai bagian dari tatanan sosial yang normal. Dalam

konteks ini, budaya patriarki dan machismo berfungsi sebagai mekanisme yang menghambat transformasi sosial yang ingin dicapai oleh MCW.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas *Magna Carta of Women* dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina masih menghadapi keterbatasan yang signifikan. Meskipun kebijakan menghasilkan kemajuan dalam aspek hukum dan kelembagaan, tujuan yang lebih substantif berupa terciptanya keamanan, perlindungan, dan kebebasan perempuan dari kekerasan seksual belum sepenuhnya tercapai karena kuatnya pengaruh budaya patriarki dan machismo dalam masyarakat Filipina.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas *Magna Carta of Women* tidak cukup dilakukan melalui penguatan regulasi dan kelembagaan semata, tetapi juga perlu disertai upaya yang berorientasi pada transformasi budaya. Mengingat budaya patriarki dan *machismo* terbukti menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas kebijakan, pemerintah Filipina perlu memperluas program pendidikan dan kampanye publik yang mendorong kesetaraan gender serta menantang norma-norma sosial yang melegitimasi subordinasi perempuan. Upaya ini penting karena perubahan hukum akan sulit menghasilkan dampak yang optimal apabila nilai dan praktik sosial yang mendasari diskriminasi tetap bertahan dalam masyarakat.

Kapasitas aparat penegak hukum dan penyedia layanan perlindungan perempuan perlu terus ditingkatkan untuk meminimalkan bias gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Implementasi kebijakan yang sensitif gender akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban untuk melapor serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan yang telah disediakan oleh negara. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial juga perlu diperluas agar perlindungan yang dijamin dalam MCW dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh perempuan.

Keterlibatan aktor non-negara juga penting dalam upaya mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan. Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, media, dan komunitas lokal perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam membangun kesadaran publik mengenai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut dapat memperkuat proses perubahan sosial yang tidak selalu dapat dicapai melalui instrumen hukum formal.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai implementasi *Magna Carta of Women* dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih empiris dengan melibatkan perspektif korban, aparat pelaksana, maupun organisasi perempuan di Filipina. Penelitian komparatif dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya juga dapat dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara budaya, efektivitas kebijakan perlindungan perempuan, dan keamanan gender dalam konteks yang lebih luas.